

**PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP
KINERJA PEJABAT PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pemerintahan Kota Makassar)**

Muttiarni

(muttiarni@unismuh.ac.id)

Muhammad Akram

Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah Kota Makassar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.

Metode ini dipilih karena sampel dipilih berdasarkan kriteria Pejabat Pemerintah Daerah yang memegang jabatan di tingkat bawah dan menengah serta pejabat yang berwenang berarti pejabat yang memiliki kegiatan penganggaran dan sekaligus sebagai eksekutif anggaran dan penanganan staf dalam penyusunan anggaran. Sampel yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 50 sampel dan diolah menggunakan program SPSS untuk menguji hipotesis.

Penelitian ini menemukan bahwa dari lima variabel Karakteristik Tujuan Anggaran, tiga variabel (partisipasi, kejelasan tujuan, umpan balik) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah di Kota Makassar, sedangkan evaluasi anggaran variabel tidak signifikan terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Kata kunci: Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the influence of Characteristics of Budget Objectives on Performance of Local Government Officials in Makassar City. Sampling technique in this research using purposive sampling.

This method was chosen because the sample was chosen based on the criteria of Local Government Officials who held positions at the lower and middle level as well as committed official means officials who have activities in budgeting and simultaneously as budget executives and staff handling in the preparation of the budget. Samples are processed in this study as many as 50 samples and processed using SPSS program to test the hypothesis.

This study found that from five variable Characteristic of Budgetary Objectives, three variables (participation, clarity of purpose, feedback) significantly influence Performance of Local Government Officials in Makassar City, while variable budget evaluation is not significant to Performance of Local Government Officials in Makassar City.

Keywords: *Characteristic of Budget Objectives towards Performance of Regional Government Officials.*

A. LATAR BELAKANG

Anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah daerah. Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menerjemahkan keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, mengingat pentingnya fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam organisasi maka proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran perlu dilakukan agar dapat disesuaikan dengan tujuan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun harus pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Mengingat pentingnya anggaran sektor publik, maka APBD harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : (1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (2) Tertib, (3) Tepat waktu, (4) Transparan, (5) Partisipatif, (6) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, kota harus mendukung tercapainya sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan 1 (satu) lintas bidang serta 9 (sembilan) bidang pembangunan dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan

pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016.

Agar pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif, penyusunan anggaran dan penerapannya harus memperhatikan 5 komponen karakteristik tujuan anggaran yaitu partisipasi penyusunan anggaran (*budgetary participation*), kejelasan sasaran anggaran (*budget goal clarity*), umpan balik anggaran (*budgetary feedback*), evaluasi anggaran (*budgetary evaluation*) dan kesulitan sasaran anggaran (*budget goal difficulty*). Adanya tujuan anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target anggaran. Selanjutnya, target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai organisasi sehingga dapat memberikan suatu tingkat kepuasan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menguji kembali “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintahan Kota Makassar)”.

B. TINJAUAN TEORETIS

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. APBD disusun berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD. Arah kebijakan umum APBD disusun setelah melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan Dokumen perencanaan daerah lainnya yang telah ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

2. Mekanisme Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2016 masih tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran (*output*) dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan

untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang dipresentasikan kedalam tolak ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh kedua belah pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. Dengan kata lain ketika diterapkan kepada perencanaan, partisipasi mengacu pada keterlibatan manajer tingkat menengah dan bawah dalam mengambil keputusan yang mengarah pada penentu tujuan operasional dan penetapan sasaran kerja. Dalam sistem keuangan daerah, peran penting APBD dapat dilihat dari fungsi utamanya. Anggaran memiliki beberapa fungsi utama yaitu: (1) Sebagai Alat Perencanaan, (2) Alat Pengendalian Anggaran, (3) Alat Kebijakan Fiskal Anggaran, (4) Alat Politik Anggaran, (5) Alat Koordinasi Dan Komunikasi Penyusun anggaran, (6) Alat Penilaian Kinerja eksekutif, (7) Alat Motivasi Anggaran.

Menurut (Indra Bastian, 2005) menjelaskan bahwa fungsi anggaran adalah sebagai berikut: (1) Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja, (2) Anggaran merupakan cetak baru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, (3) Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan sebagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan, (4) Anggaran sebagai alat pengendalian imit kerja, (5) Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi, (6) Anggaran merupakan instrumen politik

Berdasarkan definisi fungsi diatas, dapat ditarik prinsip anggaran dalam penyusunan APBD sebagai suatu perencanaan yang disusun untuk periode waktu tertentu yaitu: (1) Demokratis, (2) Adil, (3) Transparan, (4) Bermoral tinggi, (5) Berhati-hati, (6) Akuntabel.

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3. Penyusunan APBD

Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2016 masih tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran (output) dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara

jelas indikator kinerjanya yang dipresentasikan kedalam tolak ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016, dalam menyusun APBD tahun anggaran 2017 ditekankan pada penyusunan anggaran yang terpadu (unifilied budget) dimana dalam menyusun rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD secara terpadu, harus tetap sejalan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dalam siklus penganggaran ditetapkan prinsip-prinsip pokok sebagai berikut: (1) Tahap persiapan anggaran, (2) Tahap ratifikasi, (3) Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran, (4) Tahap pelaporan dan evaluasi.

Dalam rangka menyusun APBD, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, dapat dirumuskan sebagai berikut: (a) Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) oleh Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), (b) Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh pemerintah daerah, (c) Pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai PPAS antara, (d) Pemerintah daerah dengan DPRD, (e) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD, (f) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Selanjutnya menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu: Eksekutif, Legeslatif, dan Auditor

APBD sebagai proses manajemen pemerintah maka proses penyusunan APBD dianggap sebagai proses administrasi pemerintah. Birokrasi pemerintahan juga beroperasi sebagaimana organisasi perusahaan dimana setiap elemen sosial dan kenegaraan dikontrol dan diarahkan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

4. Karakteristik Tujuan Anggaran

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa sebagai instrument kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapaitujuan bernegara.

Proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apayang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan.

Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan

tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006: 188).

Dalam kajian teoritis sebagai dasar untuk penelitian ini masih banyak menggunakan kajian teoritis pada sektor privat yang berhubungan dengan variable-variabel yang diteliti. Hal ini dikarenakan variabel-variabel yang diteliti juga masih menggunakan variabel yang diteliti pada sektor privat. Namun tidak mengurangi kajian-kajian teoritis yang berhubungan dengan sektor publik sebagai dasar/acuan dalam penelitian pada sektor publik. Karakteristik Tujuan Anggaran (budgetary Goal Characteristics) 5 macam yaitu:

Partisipasi Anggaran; Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat efektivitas organisa. Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, kemungkinan akan menimbulkan dampak fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi pejabat pemerintah daerah. Munawar (2006) menemukan mekanisme input partisipasi warga negara mempunyai pengaruh langsung pada keputusan anggaran. Keuntungan penggunaan input warga negara ke dalam operasional kota bisa membantu dewandalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mewakili konstituen dan memberikan visi dan arahan kebijakan jangka panjang.

Kejelasan Tujuan Anggaran; Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat secara lebih rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang akan dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja. Seluruh program yang telah dirancang oleh masing-masing unit kerja, selanjutnya diserahkan ke Panitia Eksekutif. Panitia eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja di masing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk ke Panitia Eksekutif, selanjutnya disusun dan dirancang draft Kebijakan Pembangunan Dan Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang nantinya akan dibahas dengan pihak Legislatif (Kepmendagri No 52 Tahun 2016). Adapun tujuan penyusunan anggaran sebagai berikut: (1) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordonasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, (2) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan, (3) Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja, (4) Meningkatkan

transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat.

Umpan Balik Anggaran; Hapsari (2010) menyatakan bahwa umpan balik terhadap sasaran anggaran yang dicapai adalah variabel penting yang memberikan motivasi kepada manajer. Jika anggota organisasi tidak mengetahui hasil yang diperoleh dari upayanya untuk mencapai sasaran, maka ia tidak mempunyai dasar untuk merasakan kesuksesan atau kegagalan, dan tidak ada insentif untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, dan pada akhirnya menjadi tidak puas. Rasuli dan Darlis (2015) menyatakan umpan balik memiliki dua fungsi bagi orang-orang yang menerimanya yang pertama berkaitan dengan instruksi dan kedua adalah berkaitan dengan motivasi.

Evaluasi Anggaran; Menurut PP No. 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja daerah untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Menurut Kamaliah Darlis (2010) evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka. Evaluasi anggaran merupakan alat pengendalian terhadap kinerja anggaran. Evaluasi anggaran pada dasarnya membandingkan antara anggaran dengan pelaksanaan sehingga ditentukan penyimpangan yang terjadi.

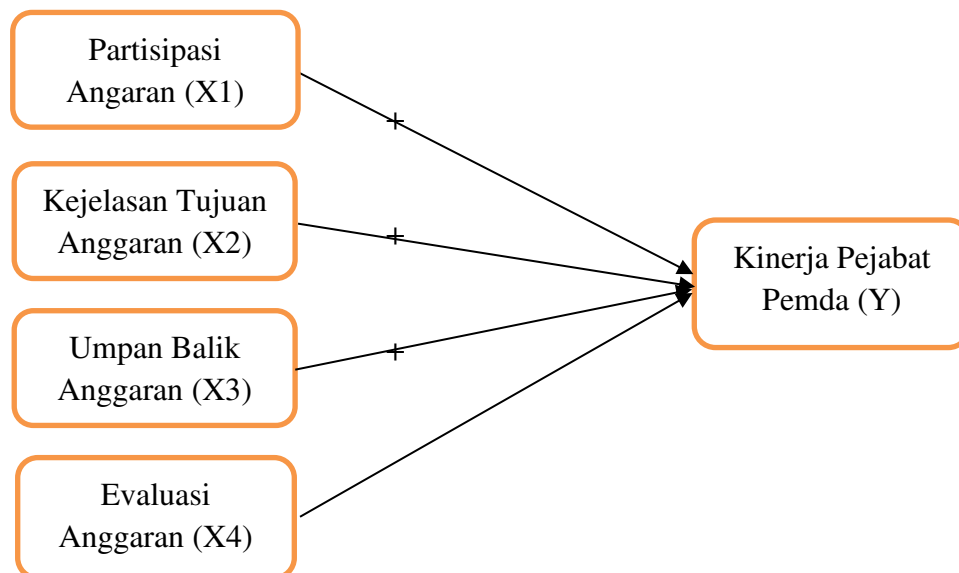
Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah; Menurut Aulia Apriani (2009), kinerja merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Menurut Bastian (2005) Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator input, output, outcome, benefit, dan impact. Sedangkan syarat indikator yang baik adalah: spesifik, measurable, Attributable, Relevan, Timely.

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Manfaat dari pengukuran kinerja yaitu: (a) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. (b) Membantu mengambil keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti

promosi, transfer, dan pemberhentian, (c) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan, (d) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka, (f) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Menurut Bastian (2005:276) setiap organisasi tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek : Aspek financial, Kepuasan pelanggan, Operasi dan Bisnis, Kepuasan pegawai, Kepuasan komunitas dan Shareholders/stakeholders, dan aspek waktu.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1. Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.

H2. Kejelasan Tujuan Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.

H3. Umpan Balik Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.

H4. Evaluasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah.

C. METODE PENELITIAN

Fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja Pejabat Pemerintah Daerah Kota Makassar. Yang dilaksanakan pada bulan Maret-April 2017. Sampel berjumlah 50 orang, dengan tehnik purposive sampling.

Data yang diperoleh berkaitan dengan pengukuran kinerja Pejabat Pemerintah Kota Makassar melalui kuesioner.

Metode analisis data dilakukan dengan dengan uji kualitas data dan uji hipotesis. Uji kualitas dengan dilakukan dengan cara: uji validitas, uji reliabilitas. Sedangkan uji hipotesis dilakukan untuk pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau simultan (analisis regresi berganda) dan secara parsial (Uji t) dilakukan dengan bantuan SPSS.

Regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan metode antar dimana semua variabel dimasukan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen melalui meregresikan kinerja pejabat pemda sebagai variabel dependen dan partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, dan evaluasi anggaran sebagai variabel independen.

Uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata nilai suatu sampel dengan nilai lainnya. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable dependen.

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dari setiap variable independent terhadap variable dependen. Model regresi berganda ini akan dapat dicerminkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan: X1: Partisipasi anggaran, X2: Kejelasan tujuan anggaran, X3: Umpan balik anggaran, X4: Evaluasi anggaran, Y: Kinerja pejabat pemda, e : Residual yang terstandarisasi (error), a : Konstanta, dan β : Koefisien regresi

Berbeda dengan alat analisis lainnya, regresi linear ganda memerlukan uji persyaratan yang sangat ketat. Uji persyaratan pada regresi linear ganda biasa disebut dengan istilah uji asumsi klasik. Setelah data yang didapat dianggap valid dan reliable, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Uji normalitas, Uji autokorelasi, Uji heterokedastisitas, Pengujian Multikolinearitas.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Data dan Deskripsi Responden

Sampel penelitian ini adalah Kepala Dinas dan kepala Bagian, DPRD bagian Anggaran yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran yang mana terdapat pada 9 kantor dinas dan 1 kantor DPRD bagian Anggaran di Pemerintahan Kota Makassar, kuisisioner yang tidak terkumpul kembali sebanyak 5 atau 10% dikarenakan 1 responden Kepala Dinas dan 4 responden Kepala Bagian dikantor dinas tidak mengembalikan kuesiner dengan waktu yang telah

disepakati atau ditentukan bersama untuk mengambil kuesioner kembali, disebabkan para responden tersebut sibuk dan lagi dinas keluar kota.

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang dilakukan terhadap seluruh item yang digunakan, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah valid dan reliable.

Uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas maka akan terdistribusi secara normal. Dari normal probability plot dapat dilihat secara seksama bahwa data menyebar sekitar garis diagonal atau mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas (Hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran).

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin-Watson, terlihat bahwa angka Durbin-Watson sebesar 1,799 nilai akan di bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikan 5% jumlah simple (n) 45 dan jumlah variabel independen 4 ($k=4$), maka di tabel Durbin-Watson test bound akan di peroleh nilai $dL=1,3357$ dan nilai $dU=1,7200$ (dapat dilihat pada lampiran).

Dari data tersebut dapat di simpulkan bahwa nilai Durbin-Watson 1,799 berada di antara dU dan $(4 - dU)$ atau 1,799 lebih besar dari 1,72 dan 1,799 lebih kecil dari 2,28 maka dapat dikatakan bahwa dalam model regresi linier tersebut tidak terdapat Autokorelasi atau tidak terjadi korelasi di antara kesalahan pengganggu.

Uji heterokedastisitas dapat dideteksi melalui grafik scatterplot deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X dan Y menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y. grafik jelas memperlihatkan bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. (dapat dilihat pada lampiran). Maka dapat di simpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastistas yang berarti modal regresi ini layak untuk memprediksikan variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen.

Pengujian Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Uji multikolinearitas menyimpulkan bahwa nilai Tolerance semua variabel lebih besar 0,05(>5%) serta nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10 ($VIF > 10$). (Dapat dilihat pada lampiran) Maka dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

2. Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan metode enter dimana semua variabel dimasukan untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen melalui meregrasikan kinerja pejabat pemda sebagai variabel dependen dan partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, dan evaluasi anggaran sebagai variabel independen. Hasil analisis regresi berganda ini menggunakan program SPSS yang sudah tercantum pada tabel dibawah ini:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-25.113	7.650		-3.283	.002		
Partisipasi Anggaran	.649	.138	.485	4.709	.000	.566	1.767
Kejelasan Tujuan Anggaran	2.549	.445	.486	5.728	.000	.836	1.196
Umpan Balik Anggaran	.327	.157	.237	2.083	.044	.463	2.160
Evaluasi Anggaran	-.055	.227	-.032	-.242	.810	.350	2.856

a. Dependent Variable: Kinerja Pejabat Pememda

Dari hasil analisis data di atas, maka hasil persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

$$Y = -25.113 + 0,649X_1 + 2,549X_2 + 0,327X_3 - 0,055X_4 + e$$

Penjelasan dari persamaan:

1. Konstanta (a). Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat sebesar -25.113.
2. Partisipasi (X1) terhadap kinerja pejabat pemda (Y). Nilai koefisien leverage untuk variabel X1 sebesar 0,649. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka variabel dependen juga mengalami peningkatan sebesar 0,649%.
3. Kejelasan Tujuan Anggaran (X2) terhadap Kinerja Pejabat Pemda (Y). Nilai koefisien leverage untuk variabel X2 sebesar 2,549. Hal

ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka variabel dependen juga mengalami peningkatan sebesar 2,549%.

4. Umpan Balik Anggaran (X3) terhadap Kinerja Pejabat Pemda (Y). Nilai koefisien leverage untuk variabel X3 sebesar 0,327. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka variabel dependen juga mengalami peningkatan sebesar 0,327%.
5. Evaluasi Anggaran (X4) terhadap Kinerja Pejabat Pemda (Y). Nilai koefisien leverage untuk variabel X4 sebesar -0,055 dan bertanda negatif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sebesar 1, maka variabel dependen juga mengalami peningkatan sebesar -0,055%.

Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini mengetahui dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $\alpha < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Sebaliknya jika signifikansi $\alpha > 0,05$ maka tidak terjadi pengaruh yang signifikan. Berikut hasil uji regresi (uji t) yang telah dibahas pada uji analisis regresi berganda:

1. Variabel partisipasi anggaran (X1) menunjukkan Coefficients Beta sebesar 0,484 pada tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variabel partisipasi anggaran (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pejabat pemda (Y) dengan demikian hipotesis H1 terbukti.
2. Variabel kejelasan tujuan anggaran (X2) menunjukkan Coefficients Beta sebesar 0,486 pada tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti variabel kejelasan tujuan anggaran (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pejabat pemda (Y) dengan demikian hipotesis H2 terbukti.
3. Variabel umpan balik anggaran (X3) menunjukkan Coefficients Beta sebesar 0,237 pada tingkat signifikansi 0,044, karena tingkat signifikansi $0,044 < 0,05$. Hal ini berarti variabel umpan balik anggaran (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pejabat pemda (Y) dengan demikian hipotesis H3 terbukti.
4. Variabel evaluasi anggaran (X4) menunjukkan Coefficients Beta sebesar -0,032 pada tingkat signifikansi 0,810, karena tingkat signifikansi $0,810 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa evaluasi anggaran secara parsial berpengaruh negative yang tidak signifikan terhadap kinerja pejabat pemerintah daerah (Y) artinya hipotesis H4 tidak terbukti.

Hasil temuan hipotesis dan pembahasan

Hasil temuan pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel partisipasi anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah daerah. Ini

berarti bahwa peningkatan atas partisipasi kinerja pejabat pemda dalam pembuatan tujuan anggaran akan meningkatkan kinerja pejabat pemda. Sebaliknya jika partisipasi kinerja pejabat pemda dalam pembuatan tujuan anggaran turun maka kinerja pejabat pemda juga akan turun. Oleh sebab itu hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima.

Hasil temuan kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel kejelasan tujuan anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah daerah. Ini berarti bahwa semakin jelas kejelasan tujuan anggaran dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi kinerja pejabat pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebaliknya jika tujuan anggaran kurang jelas maka kinerja pejabat pemda juga akan turun. Oleh sebab itu hipotesis H2 dalam penelitian ini diterima.

Hasil temuan ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel umpan balik anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah daerah. Ini berarti bahwa semakin tinggi umpan balik yang diterima pejabat pemda maka semakin tinggi kinerja pejabat pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sebaliknya jika umpan balik anggaran yang sedikit maka akan melemahkan kinerja pejabat pemda. Oleh sebab itu hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima.

Hasil temuan keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negative yang tidak signifikan atas variabel evaluasi anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah daerah. Artinya nilai evaluasi anggaran yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang semakin rendah dan sebaliknya nilai evaluasi anggaran yang semakin rendah akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang semakin tinggi.

Hal ini dikarenakan para penyusun anggaran di setiap dinas tidak bertanggung jawab atas anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya, hanya sebagian orang saja yang terlibat didalam menentukan dan menyusun anggaran. Oleh karena itu hipotesis H4 dalam penelitian ini ditolak.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menguji hipotesis pengaruh antara partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap kinerja pejabat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama penelitian ini terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel partisipasi anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah daerah. Hasil temuan kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat

pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel kejelasan tujuan anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah daerah. Hasil temuan ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan atas variabel umpan balik anggaran terhadap variabel kinerja pejabat pemerintah daerah. Hasil temuan keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negative yang tidaksignifikan atas variabel evaluasi anggaran terhadap variabel

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah' ayat 153)

Al-Qur'an (Surah An-Insyrahayat 6-8)

Aulia Apriani, M. Rasuli & Taufeni Taufik. (2009). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Pekanbaru Dengan Sikap Aparat Pemerintah Sebagai Variabel Intervening.

Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2011). Terhadap Kinerja Manajerial Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kabupaten Blora Dengan Komitmen.

Bastian, Indra.2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat Jakarta.

Hapsari, N. (2010). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Dan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Pt Adhi Karya (Persero) Tbk. Divisi Konstruksi D).Skripsi, 1–58.

Kamaliah, Darlis, E., & Virsanita, V. (2010). Pengaruh Perilaku Oportunistik Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Provinsi Di Provinsi Riau). Jurnal Ekonomi, 18(2), 50–62.

Munawar. (2006). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kupang. Simposium Nasional Akuntansi Ugm Yogyakarta.

Putu, L., Wirawati, P., Sinarwati, N. K., & Atmadja, A. T. (2014). Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 2.

_____, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.

_____, Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Walikota Makassar, Makassar.

_____, Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah, Jakarta.
- _____, Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- _____, Permendagri No. 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Jakarta
- Rasuli, M., & Darlis, E. (2015). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, 10, 179–193.
- Rahayu, dkk. (2007). Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Jambi.
- Solina, M. (2014). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Skpd Kota Tanjung Pinang.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta
- Veby Anggi Wulandari. (2008). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Pekanbaru.